

ANALISIS LOCATION QUOTIENT DAN SHIFT SHARE PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA TENGAH

LOCATION QUOTIENT AND SHIFT SHARE ANALYSIS AFTER NATURAL DISASTER IN CENTRAL JAVA

Anih Sri Suryani

(Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD
Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, lantai 2, Setjen DPR RI,
e-mail: anihss@yahoo.com)

Naskah Diterima: 22 Februari 2019, direvisi: 31 Mei 2019,
disetujui: 30 Juni 2019

Abstract

Economic growth and the process are the main conditions for maintaining economic development in the region. This is because the population growth is accompanied by economic needs that require additional income every year. The condition of areas affected by natural disasters or prone to natural disasters requires demands to fulfill their own needs. This study aims to determine the leading sectors and bases in Central Java as areas with high levels of disaster and disaster vulnerability. Quantitative methods are used to calculate Location Quotient (LQ) and Shift Share (SS) for various sectors. The data used are secondary data on Gross National Domestic Product and Gross Regional Domestic Product of Central Java Province in 2014-2017 to indicate economic growth, competitive sectors and also superior sectors. The leading sectors and potential to be developed in Central Java are: large and retail trade, car and motorcycle repairs, provision of food and drink accommodation, education services. The results of the study show that the superior and potentially superior sectors to be developed in Central Java are: large and retail trade, car and motorcycle repair, provision of food and drink accommodation, education services. While the superior sectors experienced positive growth and shift in Java Province are because of the factors and capabilities of the province of Central Java, among others: the wholesale and retail trade sector, followed by car and motorbike repair; mining and excavation; education services; and real estate.

Keywords: Location Quotient, Shift Share, economic growth, disaster.

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya merupakan kondisi utama untuk menjaga pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini karena pertumbuhan populasi diiringi kebutuhan ekonomi yang membutuhkan tambahan pendapatan tiap tahun. Kondisi wilayah yang terkena bencana alam atau rawan bencana alam membutuhkan tuntutan pemenuhan kebutuhan tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan dan basis di Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat bencana dan kerawanan bencana tinggi. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* (SS) untuk berbagai sektor. Data yang digunakan adalah data sekunder Produk Domestik Nasional Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017 untuk mengindikasikan pertumbuhan ekonomi, sektor kompetitif dan juga sektor unggulan. Sektor unggulan dan berpotensi unggul untuk dikembangkan di Jawa Tengah adalah: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makan dan minum, Jasa pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor unggulan dan berpotensi unggul untuk dikembangkan di Jawa Tengah adalah: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makan dan minum, Jasa pendidikan. Sedangkan sektor-sektor yang unggul, mengalami pertumbuhan dan pergeseran positif di Provinsi Jawa karena faktor-faktor dan kemampuan provinsi Jawa Tengah sendiri antara lain: sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti reparasi mobil dan motor; pertambangan dan penggalian; jasa pendidikan; dan real estate.

Kata kunci: *Location Quotient, Shift Share, pertumbuhan ekonomi, bencana.*

PENDAHULUAN

Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah, karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan

peningkatan *output* agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun.¹ Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat *output* pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun

¹ Tulus Tambunan. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2001.

sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi serta sikap dari *output* itu sendiri.²

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan sangat identik dengan ekonomi pembangunan. Bila sekiranya ruang gerak ekonomi pembangunan berusaha mencari strategi pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan alat yang ampuh untuk menerjemahkan strategi pembangunan tersebut dalam berbagai program kegiatan yang terkoordinir. Koordinasi ini perlu dilakukan sehingga sasaran-sasaran, baik ekonomi maupun sosial yang telah ditetapkan semula dapat dicapai secara lebih efisien.³ Dengan demikian akan dapat dihindari terjadinya pemborosan-pemborosan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengembangan metode untuk menganalisis suatu perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya sebagai sarana mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya. Pengembangan metode analisis ini kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Akan tetapi di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit.⁴ Beberapa faktor yang sering menjadi penghambat dalam melakukan analisis perekonomian diantaranya: data tentang daerah sangat terbatas terutama apabila daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal (berdasarkan fungsinya).

Proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktur dan sektoral yang tinggi.⁵ Pergeseran secara perlahan-lahan aktivitas pertanian ke arah sektor nonpertanian dari sektor industri ke sektor jasa merupakan contoh cakupan perubahan komponen utama struktural. Sementara itu, Kuznets mendefinisikan bahwa dalam proses pembangunan terjadinya perubahan struktur ekonomi yaitu ditandai dengan adanya perubahan persentase sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi. Demikian juga pergeseran dan peralihan kegiatan perekonomian dari sektor produksi primer (pertanian) menuju sektor produksi pembangunan (industri manufaktur, konstruksi) dan sektor tersier merupakan salah satu ciri transformasi struktural. Kuznetz juga berpendapat bahwa perubahan struktur ekonomi ditandai dengan menurunnya kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja. Hal sebaliknya ditunjukkan oleh sektor industri, ditandai dengan terjadi peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja.⁶

Sedangkan terkait dengan kebencanaan, dikenal dengan istilah *Ring of Fire*, menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR; Badan PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana), Indonesia merupakan negara yang paling rawan bencana alam di dunia. Berbagai bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia, antara lain: gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan rawan. Indonesia menduduki peringkat



Sumber: BNPB 2013

Gambar 1. Peta Indeks Rawan Bencana Nasional Tahun 1815 – 2012

² Soeparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.

³ Fitri Amalia, "Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB", *Jurnal Etikonomi* Vol. 11 No. 2 Oktober 2012. Hlm. 196-207.

⁴ L. Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1999.

⁵ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2004.

⁶ Kusreni. "Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Spesialisasi Sektoral dan Wilayah serta Stuktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral untuk Daerah Perkotaan di Jawa Timur." *Majalah Ekonomoni* Tahun XIX No. 1 April 2009, Hlm. 21.

pertama pada dua bencana alam yakni tsunami dan tanah longsor, peringkat ketiga pada gempa bumi, dan peringkat keenam pada banjir.⁷ UNISDR menegaskan, ancaman bencana alam di Indonesia berupa tsunami memiliki risiko dan dampak terbesar dibanding potensi bencana alam lainnya di Indonesia. Secara geografis Indonesia selalu beresiko terhadap gempa bumi yang sifatnya seismik dan vulkanik. Indonesia juga negara yang diapit oleh dua samudra besar dunia. Curah hujan Indonesia yang sekitar 2000 mm per tahun juga termasuk yang tertinggi di seluruh dunia untuk negara kepulauan.

Berdasarkan Peta Indeks Rawan Bencana Nasional yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di antara semua provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Tengah termasuk provinsi dengan indeks rawan bencana tinggi. Wilayah selatan Jawa Tengah rawan gempa bumi dan berpotensi tsunami. Sedangkan, wilayah tengah rawan longsor dan utara banjir rob. Pada periode 2009-2013, Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang mengalami bencana alam paling banyak, yaitu sebanyak 23% dari total bencana yang terjadi di Indonesia.⁸

Tabel 1. Jumlah Bencana di Indonesia Tahun 2009-2013 Menurut Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Bencana	Persentase
1	Jawa Tengah	1.788	23,00%
2	Jawa Barat	961	12,00%
3	Jawa Timur	875	11,00%
4	Sulawesi Tenggara	399	5,00%
5	Pemerintah Aceh	335	4,00%
6	Sulawesi Selatan	308	4,00%
7	Sumatera Barat	280	4,00%
8	Sumatera Selatan	244	3,00%
9	Sumatera Utara	226	3,00%
10	Kalimantan Timur	215	3,00%
11	Nusa Tenggara Timur	195	3,00%
12	DI Yogyakarta	192	2,00%
13	Kalimantan Selatan	182	2,00%
14	Jambi	152	2,00%
15	Banten	144	2,00%
16	Lampung	144	2,00%
17	Bali	143	2,00%
18	Nusa Tenggara Barat	143	2,00%
19	Riau	94	1,00%

No	Provinsi	Jumlah Bencana	Persentase
20	DKI Jakarta	84	1,00%
21	Sulawesi Tengah	81	1,00%
22	Gorontalo	75	1,00%
23	Kalimantan Barat	65	1,00%
24	Sulawesi Utara	62	1,00%
25	Sulawesi Barat	60	1,00%
26	Maluku	59	1,00%
27	Kalimantan Tengah	47	1,00%
28	Papua	43	1,00%
29	Bengkulu	40	1,00%
30	Kepulauan Riau	39	1,00%
31	Maluku Utara	21	0,00%
32	Bangka-Belitung	16	0,00%
33	Papua Barat	13	0,00%
34	Kalimantan Utara	3	0,00%
		7.756	100,00%

Sumber: BPBD (2014) dalam Isa (2016)

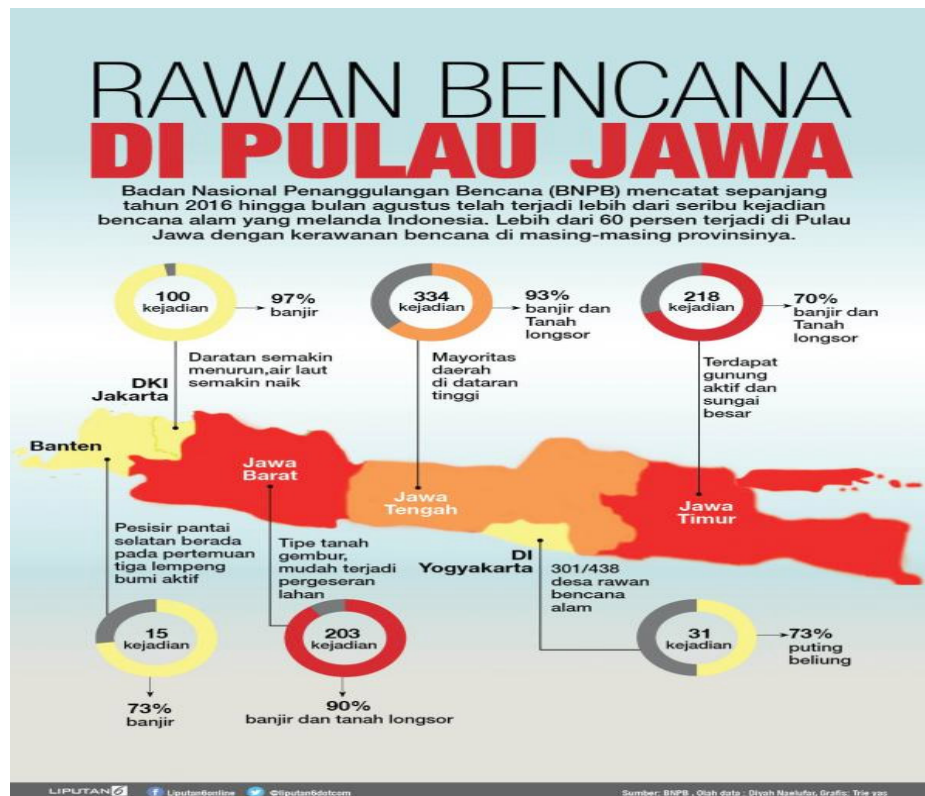
Sebagaimana Tabel 1, Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan persentasi kejadian bencana tertinggi di Indonesia pada periode tahun 2009-2013 (yakni sebesar 23%). Kejadian bencana alam tersebut kerap berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada Juni 2016 lalu, bencana banjir dan longsor melanda 16 daerah di Provinsi Jawa Tengah. Ribuan rumah hancur disapu banjir atau tertimbun longsor akibat hujan lebat yang turun sejak pagi hingga malam hari di Purworejo, Banjarnegara, Kendal, Sragen, Purbalingga, Banyumas, Sukoharjo, Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Klaten, Magelang, Wonogiri, Cilacap, Karanganyar, dan Kota Solo. Akibat bencana tersebut tercatat setidaknya 47 orang tewas dan 15 orang dinyatakan hilang. Sementara ribuan orang harus dievakuasi karena kondisi tempat tinggalnya yang sudah tidak layak huni lagi.⁹ Selain korban meninggal, sakit dan mengungsi berbagai kerusakan pun terjadi pada fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, fasilitas umum, jalan, lahan dan sebagainya. Belum lagi kerugian di sektor lain seperti perdagangan, pertanian, peternakan dan hilangnya kesempatan kerja bagi beberapa orang. Pada tahun 2016 pula, 334 kejadian bencana terjadi di Jawa Tengah (lihat Gambar 2), sebagian besar berupa banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting kiranya diketahui bagaimana pergeseran ekonomi di daerah yang rawan bencana seperti Jawa Tengah, dan juga perlu diketahui sektor-sektor mana saja yang

⁷ Aldila Rahma, "Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal." *Varia Pendidikan*. Vol. 30 No. 1 Juli 2018, hlm. 1-11.

⁸ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Peta Rawan Indeks Bencana Nasional*, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013.

⁹ "Korban Longsor Jawa Tengah, 47 Tewas dan 15 hilang," (online), (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160620_indonesia_longsor_purworejo, diakses 17 November 2018).



Sumber: BNPB (2017)

Gambar 2. Rawan Bencana di Pulau Jawa Tahun 2016

menjadi basis, unggul, potensial, dapat berkembang baik dengan kekuatan sendiri di provinsi ini. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi unggulan di Jawa Tengah? serta bagaimana pertumbuhan dan pergeseran perekonomian di Provinsi Jawa Tengah pascabencana baik untuk berbagai sektor maupun untuk sektor pertanian?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi unggulan dan Jawa Tengah dan pola pertumbuhan dan pergeserannya pasca terjadinya bencana. Serta untuk mengetahui pola pertumbuhan dan pergeseran khususnya pada sektor pertanian di Jawa Tengah pascabencana. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peningkatan perekonomian daerah yang tahan terhadap bencana.

Bencana Alam dan Perekonomian

Salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian adalah bencana alam. Beberapa peristiwa yang dapat memicu gangguan sistemik pada ekonomi regional dan nasional adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, dsb); kekerasan (perang, konflik bersenjata, dsb);

teknologi (ledakan pabrik, limbah berbahaya, dsb); kerusakan (pelayanan sosial, degradasi lingkungan, dsb).¹⁰ Bencana dalam kelompok *sudden-onset disasters* (badai, gempa bumi, banjir,) terutama akan menghancurkan modal produktif dan infrastruktur. Hal ini merupakan kerusakan yang terjadi sesaat setelah terjadi bencana. Sedangkan dampak yang lebih luas dan berjangka panjang diakibatkan oleh bencana yang masuk dalam kategori *slow-onset disasters* (kekeringan dan banjir). Bencana tersebut dapat menurunkan tingkat tabungan masyarakat, investasi, permintaan domestik secara agregat dan menurunkan kapasitas produktif. Sementara itu, kelompok *compound disasters* (aktivitas vulkanik) akan menimbulkan keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks.¹¹ Berbagai bencana alam tersebut menimbulkan berbagai dampak bagi sektor ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dampak bencana dalam tataran sistem sosial-ekonomi yang beragam diakibatkan dari kelangkaan informasi dan metodologi yang belum bisa bersifat universal dalam mengukur dampak bencana. *European Commission for Latin America and*

¹⁰ Peeling (2002) dkk dalam Listya Endang Artiani, "Dampak Ekonomi Makro Bencana: Interaksi Bencana dan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Seminar Nasional Informatika 2011* (semnasIF 2011) UPN "Veteran" Yogyakarta, 2 Juli 2011. ISSN: 1979-2328, 2011, hlm. 67.

¹¹ United Nations Disaster Relief Coordinator (UNDRCO, 1991), *Ibid*.

Caribbean (ECLAC) mengusulkan sebuah metodologi yang dirancang untuk melakukan penilaian dampak bencana bagi ekonomi, yang dibedakan dalam tiga kelompok:¹²

1. *Direct damages* (kerusakan langsung), meliputi semua kerusakan pada aset tetap, modal dan persediaan barang jadi dan setengah jadi, bahan baku dan suku cadang yang terjadi secara bersamaan sebagai konsekuensi langsung. Pada tahap ini akan menyangkut pengeluaran untuk bantuan darurat.
2. *Indirect damages* (kerusakan tidak langsung), dampaknya lebih pada arus barang yang tidak akan diproduksi dan jasa yang tidak akan diberikan setelah bencana. Kerusakan tidak langsung ini dapat meningkatkan pengeluaran operasional karena rusaknya infrastruktur. Biaya yang bertambah terletak pada penyediaan layanan alternatif (alternatif cara produksi, distribusi dan penyediaan barang dan jasa).
3. *Secondary effect* (dampak sekunder), meliputi dampak pada kinerja ekonomi secara keseluruhan yang diukur melalui variabel ekonomi makro yang paling signifikan. Variabel yang relevan dapat berupa Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencakup keseluruhan dan sektoral, neraca perdagangan dan neraca pembayaran, tingkat utang dan cadangan moneter, keadaan keuangan publik dan investasi modal bruto. Pada sisi keuangan publik seperti penurunan pendapatan pajak atau peningkatan pengeluaran dapat menjadi sangat penting. Dampak sekunder ini akan sangat dirasakan pada tahun fiskal dimana bencana terjadi, namun memungkinkan juga berdampak pada tahun fiskal selanjutnya.

Sebagai contoh bagaimana bencana alam seperti tsunami di Aceh dan gempa di Yogyakarta berpengaruh terhadap perekonomian, yaitu potensi hilangnya Pendapatan Domestik Bruto. Gempa di Indonesia bisa berpotensi menyebabkan hilangnya PDB sampai 3% (sekitar 30 milyar Dollar Amerika). Sebagaimana bencana tsunami di Aceh yang menimbulkan biaya bencana sebesar 4,5 milyar Dollar Amerika. Sementara itu, bencana gempa di Yogyakarta telah menyebabkan kehilangan 30% dari PDB daerahnya.¹³ Dampak

ekonomi yang disebabkan oleh berbagai bencana alam seperti gempa, tsunami, gunung meletus, longsor dan sebagainya telah menjadi menyita perhatian para peneliti. Fakta ini disebabkan oleh intensitas bencana alam yang semakin tinggi dan perubahan iklim yang semakin besar di masa yang akan datang.¹⁴

Hipotesis yang menyatakan bahwa dampak bencana alam dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi tidak seutuhnya sejalan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Sebagaimana penelitian Benson (1997)¹⁵, Padli dan Habibullah (2009), dan Loayza et. al, (2009) berkesimpulan bahwa bencana alam berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun Noy dan Nualsri K. (2010), Hochrainer (2009), Cavallo dkk. (2010) menyimpulkan bencana alam berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Zenklusen (2007), Yuliandari (2012) Artiani (2011), dan Rasmussen, (2012) menyebutkan bencana alam tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁶ Kreimer dan Arnold (2000), dan Guha-Sapir et al, (2004) menjelaskan banjir di negara maju tidak banyak menyebabkan korban, kerusakan dan kerugian. Sedangkan di negara berkembang, korban, kerusakan dan kerugiannya jauh lebih banyak. Negara-negara berkembang memiliki tingkat kerentanan atas bencana yang lebih tinggi dibanding negara maju.¹⁷ Chan (1997) dan Eziyi, (2011)¹⁸ menyebutkan kerentanan yang tinggi di negara berkembang antara lain dipengaruhi: (1) kemiskinan, (2) negara berkembang lebih memilih untuk melihat manfaat positif dari pembangunan ekonomi, dan menutup mata terhadap efek negatif yang ditimbulkan, (3) faktor manusia seperti kurangnya pengetahuan, kesalahan, dan kecerobohan sebagai faktor yang paling menentukan aspek kerentanan, dan (4) terbatasnya ketersediaan asuransi.

METODOLOGI

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Jawa Tengah, mengingat provinsi ini mempunyai indeks rawan bencana tertinggi di Indonesia. Sementara itu, dari segi perekonomian, Jawa Tengah

¹² R. Zapata-Marti, 1997. 'Methodological Approaches: the ECLAC Methodology. In Center for the Research on the Epidemiology of Disasters (CRED).'' In A. o.-m. disasters, *Proceedings of the expert consultation on methodologies*, Brussels, 29-30 September 1997. Belgium: Universite Catholique de Louvain, 1997, hlm. 10-12.

¹³ Kemenkeu.go.id, "Bencana Alam dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian", (online), (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bencana-alam-dan-pengaruhnya-terhadap-perekonomian/>), diakses 18 November 2018).

¹⁴ Muzakar Isa, *Bencana Alam: Berdampak Positif Atau Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi?* The 3rd University Research Colloquium 2016, hlm. 147-156.

¹⁵ Benson, C. 1997a. "The Economic Impacts of Natural Disasters in Fiji." ODI *Working Paper* No. 97. London: Overseas Development Institute.

¹⁶ *Op.cit.*, Isa (2016), hlm. 149.

¹⁷ Efriyani, Eva, Nirwana, M. Farid. "Pemetaan Ancaman Bencana Banjir Kecamatan Sungai Serut Sebagai Media Pembelajaran Topik Bahasan Global Warming di SMKN 3 Kota Bengkulu." *Pendipa Journal of Science Education*. 2018:2(1), hlm.100-105.

¹⁸ *Op.cit.*, Isa (2016), hlm. 149

merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang bermatapencarian sebagai petani sangat banyak. Oleh karena itu sektor pertanian menjadi penting di propinsi ini.

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan waktukajian antaratahun 2014 sampai dengan 2017. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data jumlah bencana alam, dampak bencana alam, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berjalan dan harga berlaku serta pertumbuhan ekonomi. Pengambilan data menggunakan metode studi dokumen. Data bencana alam diambil dari *website* Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya direktori Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Sedangkan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah diambil dari Buku Jawa Tengah dalam Angka terbitan BPS Provinsi Jawa Tengah dan *website* BPS Tahun 2014 sampai 2017.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengkuantifikasi data yang diperoleh ke dalam bentuk angka-angka yang akan diolah dengan perhitungan statistik untuk mengukur sektor ekonomi yang menjadi unggulan dan pertumbuhan masing-masing sektor tersebut

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan sektor unggulan dan nonunggulan dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah serta Analisis *Shift Share* (SS) yang digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Provinsi Jawa Tengah pasca terjadinya bencana. Dasar pemikiran teknik ini adalah teori ekonomi basis yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut.¹⁹ Teknik Analisis *Location Quotient* ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional), serta bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup.²⁰

Penentuan jenis komoditas unggulan di suatu daerah dilakukan dengan teknik analisis *Location Quotient* (LQ) Analisis LQ terdiri dari perhitungan SLQ (*Static Location Quotient*) dan DLQ (*Dinamic Location Quotient*) dengan perumusan nilai LQ adalah sebagai berikut:

$$SLQ = \frac{V_{ip} / V_p}{V_{in} / V_n}$$

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Fitri Amalia, "Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB" *Jurnal Etikonomi* Vol. 11 No. 2 Oktober 2012. hlm. 196-207.

Dynamic Location Quotient adalah modifikasi dari SLQ, dengan mengakomodasikan faktor laju pertumbuhan nilai tambah bruto dari suatu sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Berikut rumusan dari DLQ:²¹

$$DLQ_{ij} = \left(\frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_i)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right)^t$$

Dimana:

- g_{ij} = laju pertumbuhan sektor I di provinsi j dalam nasional
- g_i = rata-rata laju pertumbuhan dari semua sektor di provinsi j
- G_i = laju pertumbuhan sektor I dalam skala nasional
- G = rata-rata pertumbuhan dari semua sektor pada skala nasional
- t = selisih antara tahun akhir dengan tahun awal.

Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut: jika DLQ >1, maka potensi perkembangan sektor i di suatu provinsi lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat nasional. Namun, jika DLQ <1, maka potensi perkembangan sektor i di suatu provinsi lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat nasional. Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ menghasilkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis LQ

Kriteria	DLQ < 1	DLQ > 1
SLQ < 1	Sektor unggulan, tidak berpotensi unggul	Sektor unggulan, berpotensi unggul
SLQ > 1	Bukan sektor unggulan, tidak berpotensi unggul	Bukan sektor unggulan, berpotensi unggul

Adapun persamaan yang merumuskan Analisis *Shift Share* adalah sebagai berikut:²²

$$\begin{aligned} G_j &: Y_{jt} - Y_{j0} \\ &: (N_j + P_j + D_j) \\ N_j &: Y_{j0} (Y_t / Y_0) - Y_{j0} \\ (P + D)_j &: Y_{jt} - (Y_t / Y_0) Y_{j0} \\ &: (G_j - N_j) \\ P_j &: \sum_i [(Y_{it} / Y_{i0}) - (Y_t / Y_0)] Y_{ij0} \\ D_j &: \sum_t [Y_{ijt} - (Y_{it} / Y_{i0}) Y_{ij0}] \\ &: (P + D)_j - P_j \end{aligned}$$

Dimana:

- G_j : Pertumbuhan PDRB Total Provinsi,
- N_j : Komponen *Share* di Provinsi,

²¹ *Op.cit.*, Fajar (2012).

²² John Glasson, *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sihotang. Jakarta: Lembaga Penerbit UI. 1990.

- (P + D)_j : Komponen *Net Shift* di Provinsi,
- P_j : *Proportional Shift* Kabupaten Provinsi,
- D_j : *Differential Shift* Provinsi,
- Y_j : PDRB total Provinsi,
- Y : PDRB Total Nasional,
- o dan t : Periode Awal dan Periode Akhir Perhitungan,
- i : Subskripsi Sektor (subsektor) pada PDRB.

Tahapan berikutnya adalah dengan melakukan analisis *Shift Share*. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain.²³ Tiga bidang yang saling berhubungan itu meliputi: *Pertama*, pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral kemudian dibuat perbandingan dengan sektor perekonomian yang sama sebagai acuan, sehingga diketahui perubahan dan perbandingannya.

Analisis *Shift Share* membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor industri di daerah dengan wilayah nasional.²⁴ Analisis *Shift-Share* (SS) bertujuan untuk mengetahui kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan perekonomian nasional.

Analisis *Shift Share* dilakukan sebagai berikut:

- Jika $D_j > 0$, maka pertumbuhan sektor i di provinsi lebih cepat dari pertumbuhan sektor yang sama di tingkat nasional dan bila $D_j < 0$, berarti pertumbuhan sektor i di provinsi relatif lebih lambat dari pertumbuhan sektor yang sama di tingkat nasional.
- Bila $P_j > 0$, maka provinsi akan berspesialisasi pada sektor yang di tingkat provinsi tumbuh lebih cepat. Sebaliknya jika $P_j < 0$, maka provinsi akan berspesialisasi pada sektor yang di tingkat nasional tumbuh lebih lambat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor Unggulan dan Basis di Jawa Tengah



Grafik 1. Perhitungan SLQ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Kedua, pergeseran proporsional (*proportional shift*) digunakan untuk mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan pada suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. *Ketiga*, Pergeseran diferensial (*differential shift*) digunakan untuk membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan.

²³ Arsyad dalam *Opcit* Amalia (2012).

Kriteria SLQ menyatakan, apabila Nilai $SLQ > 1$, maka sektor tersebut dianggap unggul. Berdasarkan Grafik 1, terlihat bahwa sektor yang paling unggulan di Jawa Tengah adalah industri pengolahan, disusul

²⁴ Tarigan (2012) dalam Yurlina, M. Rachmad R, Selamet Rachmadi. "Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Batanghari." *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3 No. 2 Oktober-Desember 2015, hlm. 115-128.

kemudian jasa pendidikan, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta pertanian. Sektor-sektor tersebut sudah dapat bersaing dengan daerah lainnya dan dapat memenuhi kebutuhan di Jawa Tengah dan berpotensi besar untuk dapat mensuplai produk tersebut ke daerah lainnya.

Perbandingan antara PDB Indonesia dan PDRB Jawa Tengah berdasarkan lapangan usaha dan juga nilai SLQ untuk berbagai sektor pada tahun 2017 dapat dilihat dari Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut nilai $SLQ > 1$ untuk sektor pertanian industri pengolahan, penyediaan akomodasi makan dan minum dan jasa pendidikan. Pada tahun 2017, PDRB untuk sektor industri pengolahan mencapai Rp2,1 triliun. Sebagian besar berupa industri pengolahan nonmigas, sebesar Rp1,9 triliun. Di antara industri nonmigas tersebut, nilai terbesar berada pada industri makanan dan minuman, disusul kemudian industri barang logam komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik. Baru kemudian di urutan berikutnya industri alat angkut.

berperan dalam perekonomian Jawa Tengah.

Apabila $SLQ = 1$, maka sektor ini potensinya dianggap setara dengan daerah lain. Pada analisis SLQ ini tidak ada sektor yang pas bernilai 1, namun ada 2 sektor yang nilainya mendekati 1, yakni sektor perdagangan besar dan reparasi mobil dan sepeda motor ($SLQ = 1.01$).

Sedangkan analisis DLQ untuk PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan lapangan usaha tahun 2014 sampai dengan 2017 dapat ditunjukkan oleh Grafik 2. Nilai DLQ tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian, jauh di atas sektor lain dan di bawahnya yakni real estate dan jasa pendidikan. Sedangkan nilai DLQ terendah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa lainnya dan juga transportasi dan pergudangan. Dengan demikian, sektor yang sangat potensial menjadi unggulan di Jawa Tengah adalah sektor pertambangan dan penggalian, dan yang paling tidak potensial adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Tabel 3. Perbandingan PDB Indonesia dan PDRB Jateng Tahun 2017

Lapangan Usaha	PDB Indonesia		PDRB Jateng		
	Rp milyar	%	Rp milyar	%	SLQ
Pertanian	1,785,881	13.62	167,247	14.08	1.03
Pertambangan dan Penggalian	1,028,772	7.85	30,023	2.53	0.32
Industri Pengolahan	2,739,415	20.90	414,989	34.93	1.67
Pengadaan Listrik dan gas	162,340	1.24	1,128	0.09	0.08
Pengadaan Air, pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,720	0.07	711	0.06	0.81
Konstruksi	1,409,834	10.75	122,937	10.35	0.96
Perdagangan, Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,767,718	13.48	161,417	13.59	1.01
Transportasi dan Pergudangan	735,230	5.61	38,028	3.20	0.57
Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	387,467	2.96	38,019	3.20	1.08
Informasi dan Komunikasi	515,889	3.94	39,126	3.29	0.84
Jasa Keuangan dan Asuransi	571,129	4.36	35,219	2.96	0.68
Real Estate	379,783	2.90	19,837	1.67	0.58
Jasa Perusahaan	283,217	2.16	4,465	0.38	0.17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	502,239	3.83	33,086	2.78	0.73
Jasa Pendidikan	446,785	3.41	53,022	4.46	1.31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,967	1.11	10,360	0.87	0.79
Jasa Lainnya	239,122	1.82	18,437	1.55	0.85
Produk Domestik Regional Bruto	13,109,507	100.00	1,188,049	100.00	13

Sumber: Biro Pusat Statistik 2017

Masih berdasarkan Tabel 3 dan Grafik 1, nilai $SLQ < 1$ yang merupakan sektor nonunggulan di Jawa Tengah terdiri dari 12 sektor. Sektor-sektor tersebut antara lain: pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan, pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, dsb. Sektor-sektor tersebut tidak potensial di Jawa Tengah dan harus disuplai oleh daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian sektor-sektor tersebut dianggap kurang

Gabungan analisis SLQ dan DLQ dapat ditunjukkan oleh Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4 tersebut, dapat dilihat bahwa sektor unggulan dan berpotensi unggul di Jawa Tengah antara lain: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makan dan minum, dan juga jasa pendidikan. Oleh karena itu, ketiga sektor tersebut dapat menjadi basis pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Apabila dihubungkan dengan kejadian



Grafik 2. Perhitungan DLQ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2017

bencana di Jawa Tengah, ketiga sektor tersebut tetap unggul dan berpotensi unggul walaupun daerah tersebut kerap mengalami bencana. Sebagaimana diliris Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang menyebutkan perusahaan atau usaha yang paling banyak di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017

1,02% saja. Sisanya, skala usaha usaha menengah kecil. Adapun usaha atau perusahaan terbanyak kedua bergerak di bidang industri pengolahan dengan persentase 24%. Sementara peringkat ketiga terbesar adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 15%.²⁵

Tabel 4. Analisis LQ

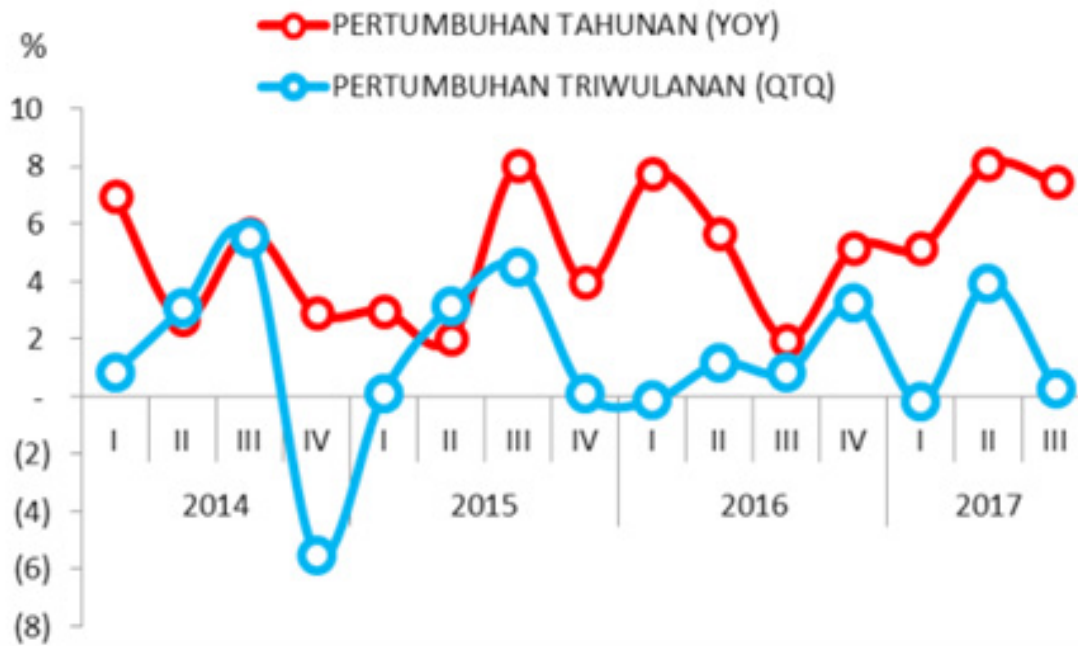
Kriteria	DLQ < 1	DLQ > 1
SLQ > 1	Sektor unggulan, tidak berpotensi unggul	Sektor unggulan, berpotensi unggul
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pertanian ✓ Industri Pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor ✓ Penyediaan akomodasi makan dan minum ✓ Jasa pendidikan
SLQ < 1	Bukan sektor unggulan, tidak berpotensi unggul	Bukan sektor unggulan, berpotensi unggul
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah ✓ Konstruksi ✓ Jasa keuangan dan asuransi ✓ Adm. Pemerintahan, pertahanan, jamsos ✓ Transportasi dan pergudangan ✓ Jasa lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pertambangan dan penggalian ✓ Pengadaan listrik dan gas ✓ Real estate ✓ Jasa perusahaan ✓ Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

Sumber: BPS Jawa Tengah 2017 dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia November 2017

adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor dengan porsi 43,16%. Persentase tersebut dari sekitar 4,17 juta usaha atau perusahaan hasil sensus ekonomi 2016. Dari total jumlah usaha atau perusahaan itu, yang terkategori usaha menengah besar hanya

Berdasarkan Grafik 3, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil

²⁵ Kabar24.bisnis.com, "Usaha di Jateng Didominasi Perdagangan Besar dan Eceran", (online) <http://kabar24.bisnis.com/read/20170525/78/656869/usaha-di-jateng-didominasi-perdagangan-besar-dan-eceran>, diakses 21 November 2018.



Grafik 3. Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Motor dan Sepeda Motor di Jawa Tengah Tahun 2014-2017

dan sepeda motor di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 mengalami penurunan hingga ke angka negatif, terutama di triwulan keempat. Namun kemudian dapat naik dan kembali ke nilai positif. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah mengalami bencana alam dengan

frekuensi yang cukup tinggi, penurunan sektor ini pada tahun 2014 di triwulan keempat patut diduga dipengaruhi oleh berbagai bencana tersebut, walau memang perlu analisis lebih lanjut. Namun setelahnya, sektor ini dianggap bisa bangkit kembali dan menjadi sektor unggulan serta berpotensi unggul.

Tabel 5. Hasil Perhitungan *Shift Share*

Sektor	Shift Share					
	G	R	Sp	Sd	S	G=R+S
Pertanian	10332	15217	-3011	-1873	-4884	10332
Pertambangan dan Penggalian	4807	2197	-2483	5092	2609	4807
Industri Pengolahan	37294	38330	-1896	860	-1036	37294
Pengadaan Listrik dan gas	110	122	-53	41	-12	110
Pengadaan Air, sampah, Limbah dan Daur Ulang	60	80	11	-31	-20	60
Konstruksi	16080	10825	4135	1120	5255	16080
Perdagangan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18443	15655	-3017	5805	2788	18443
Transportasi dan Pergudangan	4999	3511	2555	-1067	1489	4999
Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	4954	3313	392	1249	1641	4954
Informasi dan Komunikasi	10355	4253	5135	967	6102	10355
Jasa Keuangan dan Asuransi	4771	2838	2134	-201	1933	4771
Real Estate	3080	1945	-153	1288	1135	3080
Jasa Perusahaan	770	357	285	129	413	770
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	2229	2975	-827	81	-746	2229
Jasa Pendidikan	6553	3849	374	2330	2704	6553
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1609	835	336	437	774	1609
Jasa Lainnya	2644	1682	1518	-556	962	2644
Total	129091	107985	0	15670	21106	129091

Sumber: Hasil Pengolahan Data

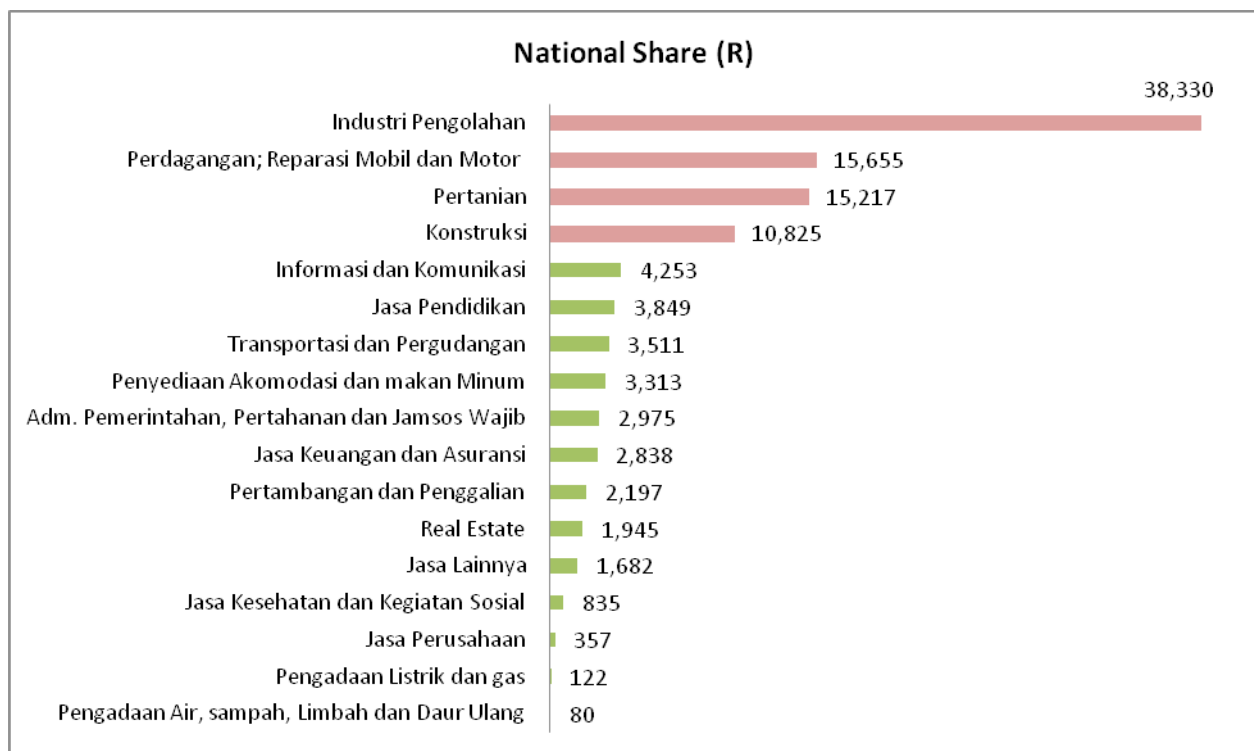
Pergeseran Berbagai Sektor Perekonomian di Jawa Tengah Pascabencana

Pertumbuhan PDRB total (Y) dapat diuraikan menjadi komponen *shift* dan komponen *share* yang merupakan analisis penentuan sektor ekonomi strategis dan memiliki keunggulan untuk dikembangkan dengan tujuan untuk memacu laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah hasil perhitungan *Shift Share* untuk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 dan 2017.

Untuk mengetahui sektor spesialisasi daerah serta pertumbuhannya digunakan komponen *National/Regional Share (R)*. *National Share (R)*, mengukur peran kinerja perekonomian wilayah yang tingkatannya lebih tinggi secara keseluruhan terhadap kinerja perekonomian wilayah, atau dalam hal ini kinerja perekonomian Indonesia terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah. *National Share* juga digunakan untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian nasional.

Selanjutnya dilakukan perhitungan *Propositional Shift* untuk mengukur peran sektor-sektor di perekonomian wilayah yang tingkatannya lebih tinggi terhadap kinerja perekonomian wilayah. Berdasarkan Grafik 5, pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi, konstruksi, transportasi pergudangan, jasa keuangan dan jasa lainnya di tingkat nasional mengalami peningkatan. Hal ini berpengaruh pada pertumbuhan sektor-sektor tersebut di tingkat provinsi, sehingga sektor informasi dan komunikasi di Jawa Tengah naik sebesar 5,135 trilyun rupiah.

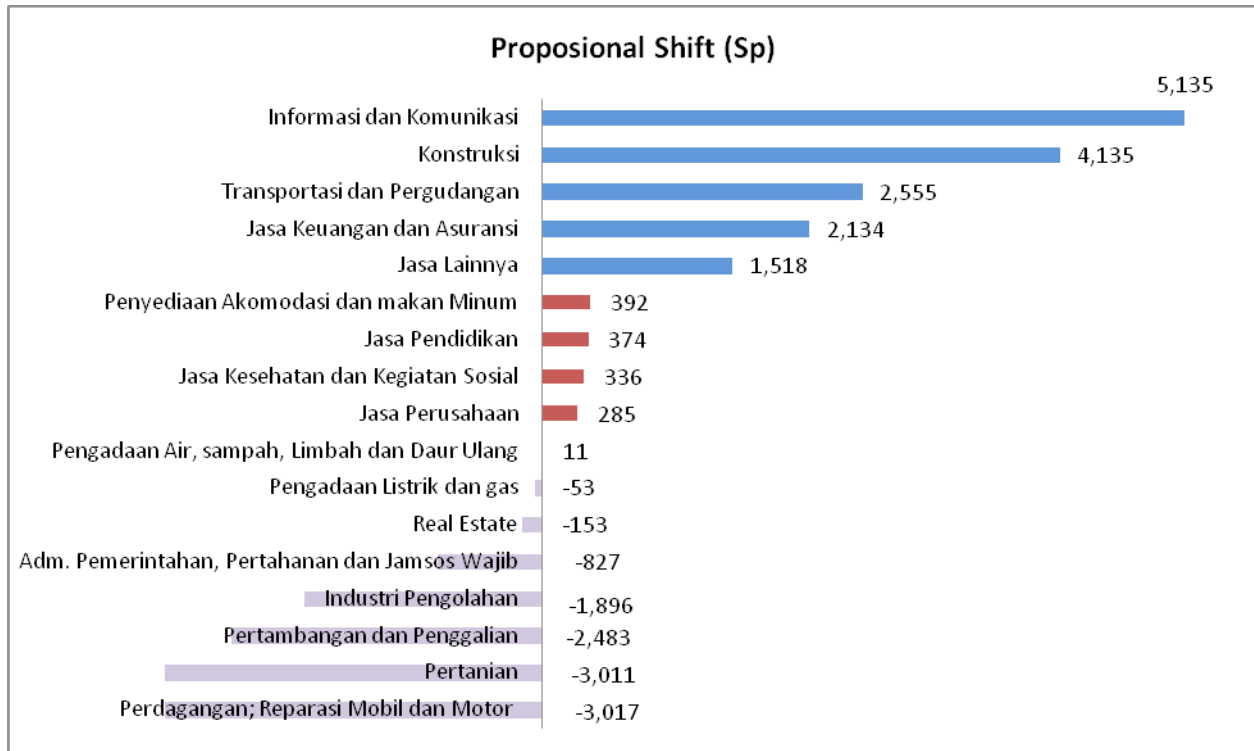
Sebaliknya, terjadi penurunan sektor pertanian, transportasi dan jasa lainnya pada tingkat nasional yang berakibat menurunnya peran sektor-sektor tersebut di Jawa Tengah. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa terdapat 10 sektor di tingkat nasional yang tumbuh yang menyebabkan pertumbuhan sektor tersebut di tingkat provinsi. Dan juga terdapat 7 sektor yang penurunannya di tingkat nasional berdampak pada penurunan sektor tersebut di Jawa Tengah.



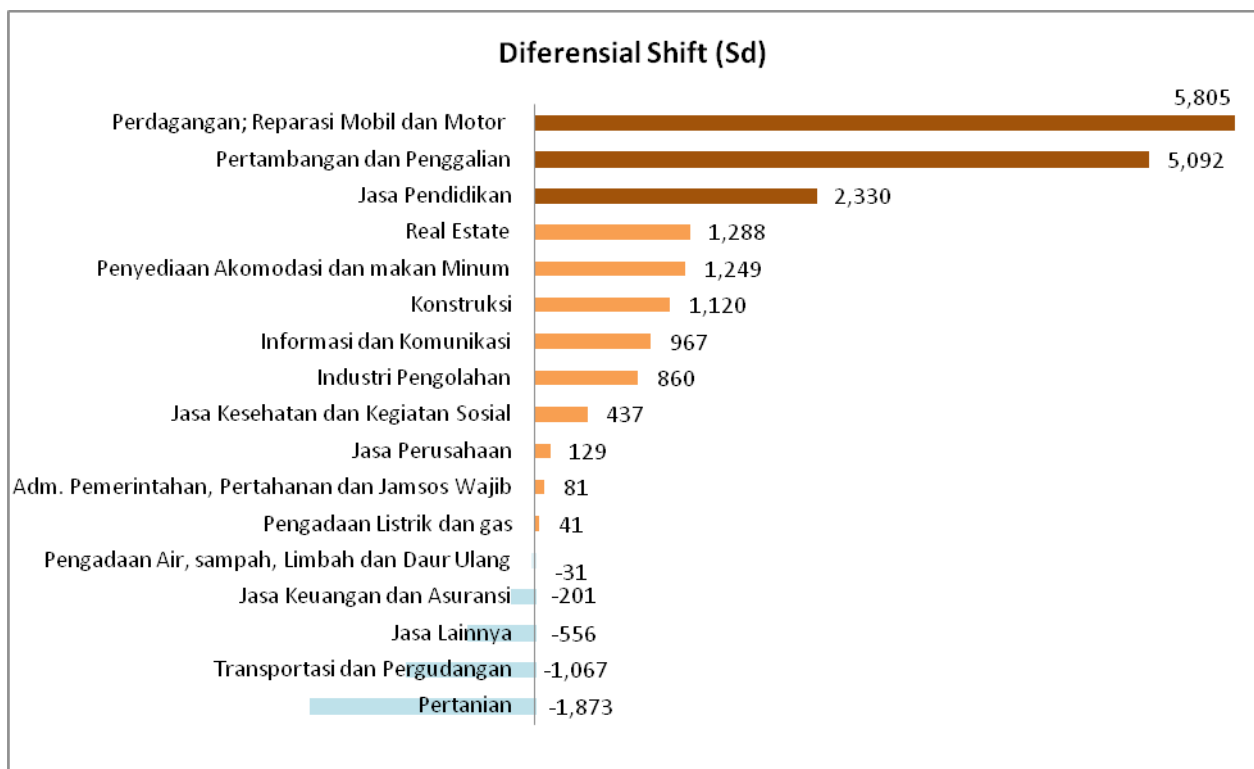
Grafik 4. *National Share* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan Grafik 4, terlihat bahwa peran kinerja ekonomi nasional terhadap kinerja ekonomi Jawa Tengah paling tinggi pada sektor industri pengolahan. Disusul kemudian perdagangan, reparasi mobil dan motor, pertanian dan konstruksi. Sementara itu, peran/*sharing* kinerja perekonomian nasional terhadap Jawa Tengah paling rendah pada sektor pengadaan air, sampah dan limbah; pengadaan listrik dan gas; dan juga jasa perusahaan.

Selanjutnya dilakukan analisis *Differential Shift* atau *Competitive Position* untuk melihat perbedaan pertumbuhan perekonomian satu daerah dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat nasional. Apabila *Diferensial Shift* bernilai positif, maka sektor tersebut pada tingkat provinsi mengalami pertumbuhan lebih cepat daripada tingkat nasional. Sementara jika *Diferensial Shift* bernilai negatif, artinya tidak terjadi pertumbuhan sektor tersebut di tingkat provinsi.



Grafik 5. Regional Shift Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017



Grafik 6. Diferensial Shift Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan Grafik 6, dapat dilihat bahwa sebagian besar sektor di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan lebih tinggi daripada tingkat nasional. Adapun sektor-sektor yang tumbuh karena kemampuan provinsi Jawa Tengah sendiri yang paling tinggi adalah sektor perdagangan besar dan

eceran, kemudian diikuti reparasi mobil dan motor; pertambangan dan penggalian; jasa pendidikan; dan real estate. Sedangkan sektor-sektor ekonomi yang tidak tumbuh di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2014-2017 antara lain: pertanian, transportasi pergudangan, dan jasa lainnya.

Apabila dilihat dari PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 berdasarkan lapangan usaha atas harga konstan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor bernilai Rp. 1,3 triliun, di mana sebagian besar untuk perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor (sekitar 1 triliun rupiah). Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan sebelumnya, bahwa berdasarkan data BPS, usaha yang paling banyak di Provinsi Jawa Tengah adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor dengan porsi 43,16%. Jika dirinci, usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor terdiri dari 1,78 juta usaha menengah kecil dan 17.896 usaha menengah besar. Adapun di industri pengolahan terdapat 1,01 juta usaha menengah kecil dan 6.187 industri menengah besar.²⁶

Demikian juga pada tingkat nasional, Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa kegiatan bisnis dan perekonomian masyarakat Indonesia saat ini masih terpusat di tiga sektor utama. Ketiga sektor tersebut adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, Industri pengolahan, dan penyediaan akomodasi; serta penyediaan makan dan minum. Ketiganya mencakup 79,42% dari keseluruhan usaha dan perusahaan yang dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketiga sektor ini pun menyumbang penyerapan tenaga kerja terbesar, yakni sekitar 70,32 juta tenaga kerja sektor nonpertanian dan 22,36 juta tenaga kerja disumbang dari sektor perdagangan besar dan eceran. Sedangkan untuk industri pengolahan, meskipun memiliki jumlah usaha dan perusahaan yang lebih rendah dibanding sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, namun dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak (sekitar 16% atau sekitar 8,4 juta tenaga kerja).²⁷

Berdasarkan data Bank Indonesia, pada tahun 2016, Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang terjadi pada seluruh lapangan usaha. Dari sisi produksi, pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,73%, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 10,62% serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,86%.²⁸

Apabila dikaitkan dengan kondisi geografis Provinsi Jawa Tengah dengan indeks kerawanan bencana alam yang tinggi, maka sektor-sektor yang tumbuh karena dirinya sendiri tersebut bisa dikatakan pertumbuhannya tidak terpengaruh langsung oleh kondisi bencana. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, pada triwulan keempat tahun 2014 memang mengalami sedikit penurunan, namun kemudian dapat naik kembali, dan berdasarkan analisis *differential share* justru dapat menjadi sektor yang pertumbuhan karena diri sendirinya paling tinggi. Demikian juga, sektor pertambangan dan penggalian, dapat menjadi sektor yang tumbuh tinggi. Lokasi penambangan atau penggalian yang tidak berada di lokasi bencana menyebabkan sektor dapat tumbuh karena faktor-faktor yang ada di Jawa Tengah sendiri. Hal yang sama terjadi pada sektor jasa pendidikan. Berbagai bencana alam yang kerap terjadi di Jawa Tengah tidak menjadikan sektor ini pertumbuhannya negatif, tapi sebaliknya menjadi sektor yang dapat tumbuh lebih cepat daripada tingkat nasional.

Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor pertanian. Seperti terlihat pada Grafik 6. Nilai *Diferensial Shift* untuk sektor pertanian mempunyai nilai negatif, atau dapat dikatakan tidak tumbuh di Jawa Tengah. Padahal dalam keadaan rawan bencana, sektor ini menjadi andalan untuk menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat, khususnya para korban/penyintas bencana. Oleh karena itu, pada tulisan ini dibahas dalam subbab khusus terkait analisis *Shift Share* untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

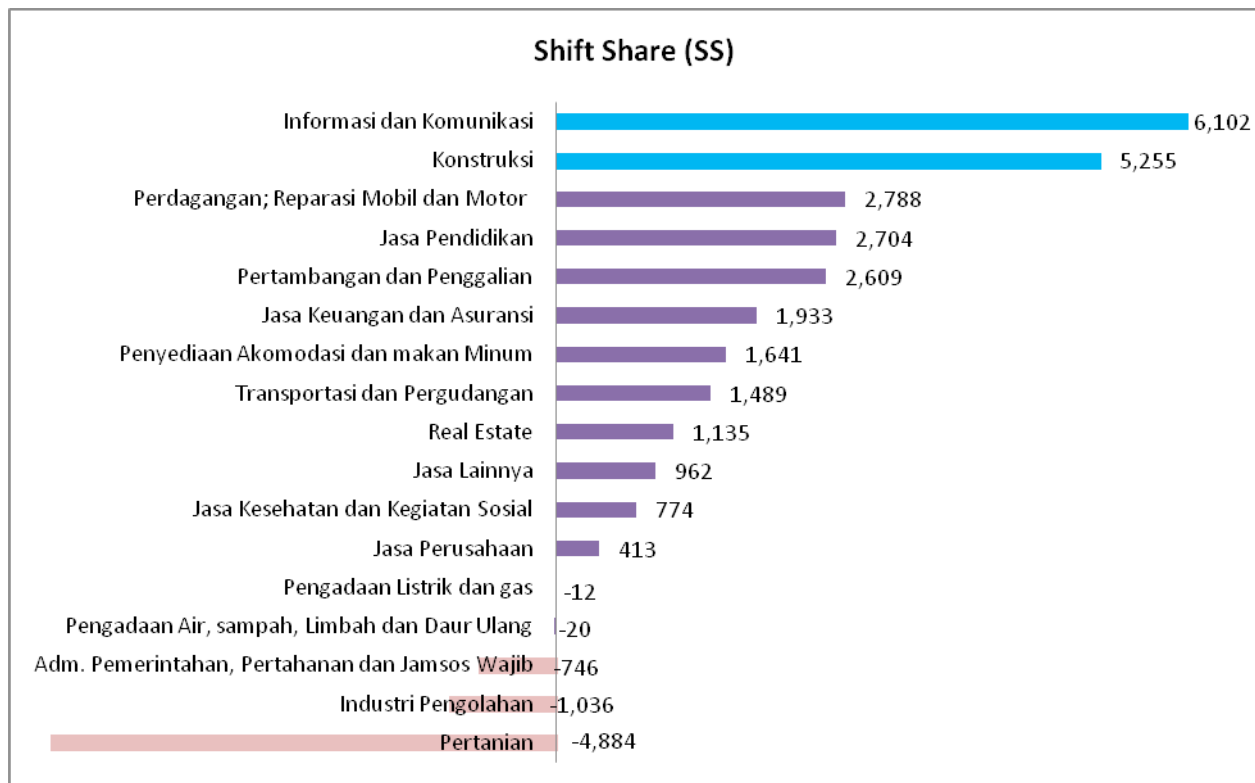
Hasil perhitungan *Shift Share* untuk seluruh sektor di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 s.d. 2017 dapat dilihat pada Grafik 7. Analisis *Shift Share* ini memperlihatkan pergeseran sektor ekonomi di Jawa Tengah, baik yang disebabkan oleh pergeseran tingkat nasional, maupun faktor-faktor lain di Jawa Tengah itu sendiri. Dari Grafik 7 terlihat, bahwa hampir semua sektor di Jawa Tengah mengalami pergeseran ke arah positif selama kurun waktu 2014-2017. Pergeseran tertinggi ada pada sektor informasi dan komunikasi, disusul kemudian konstruksi, perdagangan eceran dan besar, dan reparasi mobil dan motor, serta jasa pendidikan.

Kembali dikaitkan dengan kondisi kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah, adanya pergeseran ke arah positif pada sektor informasi dan komunikasi adalah hal yang baik. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat terjadinya bencana jaringan informasi dari lokasi bencana ke daerah lainnya tidak boleh terputus, agar informasi yang benar dan akurat segera dapat disampaikan. Dengan demikian, penanggulangan bencana pada fase tanggap darurat dapat segera

²⁶ Biro Pusat Statistik. 2014. PDRB Jawa Tengah Tahun 2017.

²⁷ Bisnis.tempo.co. "BPS: Ketiga Ekonomi Masyarakat Masih Terpusat di 3 Sektor ini". (online). <https://bisnis.tempo.co/read/870009/bps-kegiatan-ekonomi-masyarakat-masih-terpusat-di-3-sektor-ini>, diakses 2 Desember 2018.

²⁸ Jpp.go.id. "Kontribusi Jawa Tengah untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional", (online). <https://jpp.go.id/ekonomi/perdagangan/302626-geliat-ekonomi-jawa-tengah>, diakses 17 November 2018.



Grafik 7. *Shift Share* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

dilakukan. Adanya informasi yang salah, tidak akurat serta berita-berita *hoax* terkait bencana justru berpotensi menimbulkan bencana baru yang lebih parah. Salah satu faktor yang menyebabkan bencana di Jawa Tengah tahun 2014 dapat segera ditanggulangi adalah karena baiknya sistem informasi. Selain menggunakan penerapan *Early Warning System* (EWS) yang dapat mendeteksi bencana sejak dini di wilayah paling rawan bencana di Jawa Tengah, komunikasi dengan masyarakat juga terus ditingkatkan. Sehingga, informasi kejadian bencana dapat segera diterima oleh pihak yang berwenang untuk selanjutnya dapat dilakukan penanganan. Salah satu upayanya, dengan menyebarkan nomor telepon posko BPBD provinsi maupun kabupaten/kota melalui media massa, jejaring sosial, kantor pemerintahan, dan sebagainya.²⁹

Demikian juga tingginya *Shift Share* untuk sektor konstruksi berpengaruh positif terhadap upaya rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Jawa Tengah. Dampak peristiwa bencana alam yang paling terlihat antara lain rusaknya bangunan, jalan, jembatan dan juga fasilitas infrastruktur yang lainnya. Pembangunan sektor konstruksi tentu akan berperan penting dalam pemulihan pascabencana dan turut mendorong peningkatan perekonomian

daerah baik dalam pergerakan penduduk antara wilayah maupun dalam distribusi barang dan jasa.

Masih berdasarkan Grafik 7, hanya lima sektor yang nilai pergeserannya negatif, yang terendah adalah sektor pertanian. Apabila dilihat dari analisis *Proposional Shift Dan Diferensial Shift*, pertumbuhan sektor pertanian di Jawa Tengah ini rendah dikarenakan pertumbuhan di tingkat nasional rendah dan juga pertumbuhan di tingkat provinsi sendiri rendah. Dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian ini terdiri dari tiga sub sektor, yakni: *pertama*, pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian; subsektor ini dibagi lagi menjadi: tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Berikutnya kehutanan dan penebangan kayu; dan yang terakhir perikanan.

Oleh karena itu, dalam rangka menghindari kondisi rawan pangan, khususnya di daerah yang rawan bencana, perlu kiranya dikaji lebih lanjut di antara sektor pertanian tersebut subsektor mana saja yang pergeserannya negatif, dan barangkali ada subsektor yang pergeserannya positif.

Pertumbuhan dan Pergeseran Sektor Pertanian di Jawa Tengah Pascabencana

Berdasarkan Tabel 6 dan juga Grafik 8, terlihat sebagian besar nilai *Shift Share*, *Diferensial Shift* dan *Proposional Shift* bernilai negatif. Pertumbuhan (G) positif terjadi pada pertanian, peternakan,

²⁹ Anih Sri Suryani, 2017. "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Kesehatan Lingkungan Bagi Penyintas Bencana Studi di Provinsi Riau dan Jawa Tengah." *Jurnal Aspirasi* Vol. 8 No. 1 Juni 2017. Hlm. 55-76.

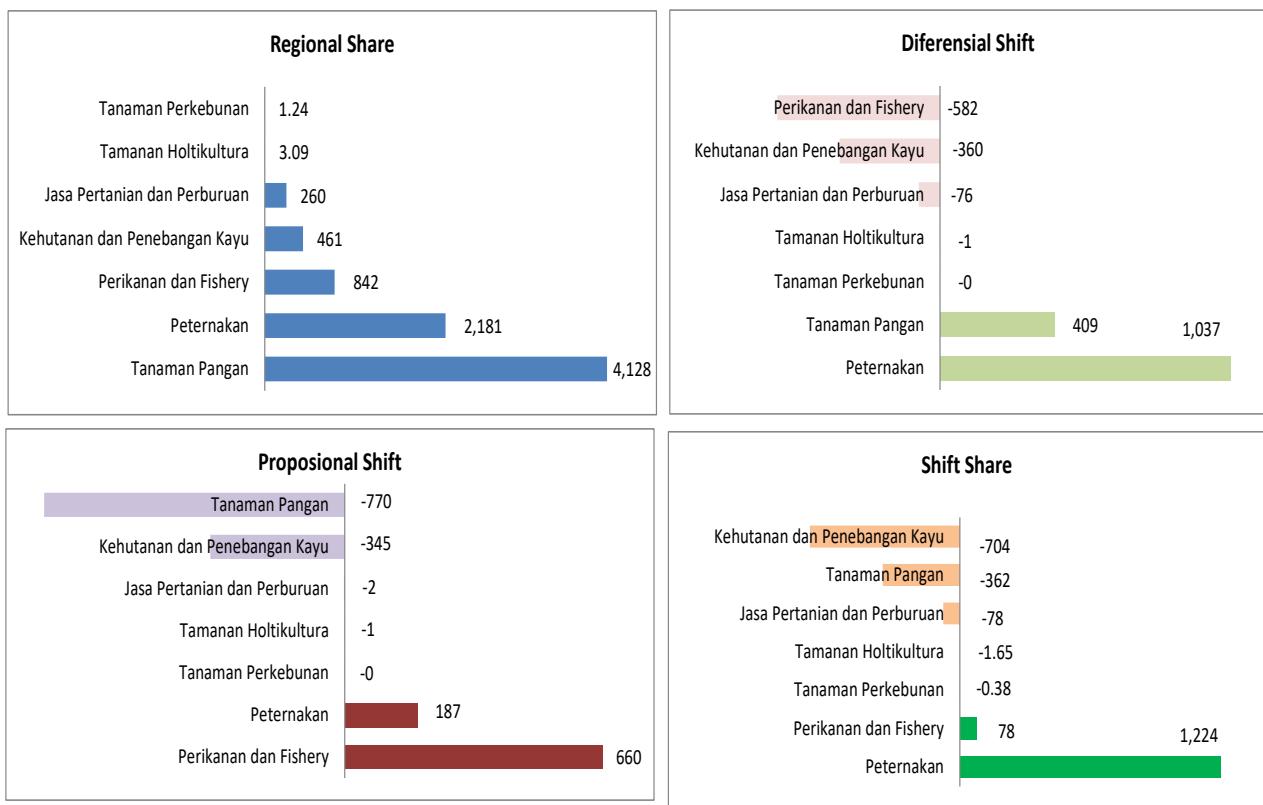
Tabel 6. Hasil Perhitungan Shift Share Sektor Pertanian

Sektor	Shift Share					
	G	R	Sp	Sd	S	G=R+S
Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian	9656	10902	-1284	37	-1247	9656
a. Tanaman Pangan	3766	4128	-770	409	-362	3766
b. Tamanan Holtikultura	1.44	3.09	-0.78	-0.87	-1.65	1.44
c. Tanaman Perkebunan	0.86	1.24	-0.12	-0.26	-0.38	0.86
d. Peternakan	3405	2181	187	1037	1224	3405
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	183	260	-2.05	-76	-78	183
Kehutanan dan Penebangan Kayu	-243	461	-345	-360	-704	-243
Perikanan dan Fishery	920	842	660	-582	78	920
Total Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10332	12205	-	-1873	-1873	10332

perburuan dan jasa pertanian; serta perikanan dan fishery. Sedangkan kehutanan dan penebangan kayu kinerjanya negatif. Analisis regional/National Share menunjukkan bahwa kinerja tanaman pangan, peternakan, perikanan merupakan tiga subsektor nasional yang paling berpengaruh terhadap kinerja pertanian di Jawa Tengah. Analisis Proportional Shift menunjukkan bahwa pertumbuhan subsektor perikanan dan fishery, dan juga peternakan di tingkat nasional berdampak pada meningkatnya subsektor ini di Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga, menurunnya subsektor tanaman pangan, kehutanan dan penebangan kayu pada level nasional berdampak pada penurunan kinerja subsektor ini di Jawa Tengah.

Sedangkan berdasarkan Analisis Shift Share didapatkan bahwa subsektor peternakan dan perikanan fishery pertumbuhannya positif, baik dipengaruhi oleh pertumbuhan positif di tingkat nasional maupun peran provinsi itu sendiri. Sedangkan subsektor kehutanan penebangan kayu, tanaman pangan, serta jasa pertanian dan perburuan pergeserannya negatif yang disebabkan oleh penurunan subsektor ini di tingkat nasional maupun karena faktor internal di Provinsi Jawa Tengah sendiri.

Subsektor bidang pertanian yang dapat berkembang dengan sendirinya di Provinsi Jawa Tengah adalah peternakan dan tanaman pangan.



Grafik 8. Shift Share Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Ditandai dengan nilai *Diferensial Shift* yang positif. Adapun perikanan dan *fishery*, serta kehutanan dan penebangan kayu sama sekali tidak dapat tumbuh dengan sendirinya di Jawa Tengah. Pertumbuhan yang terjadi di subsektor tersebut hanya dikarenakan faktor-faktor dari level nasional. Subsektor kehutanan dan penebangan kayu tidak tumbuh di Jawa Tengah bisa jadi dikarenakan jumlah luas hutan yang sudah makin berkurang, dan juga jumlah pohon yang dapat ditebang makin menipis.

Sementara itu, peternakan dan tanaman pangan ternyata merupakan subsektor yang dapat berkembang karena kekuatan dan potensi di Jawa Tengah sendiri. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan telah memberikan andil yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya penyerapan tenaga kerja sektor peternakan sebanyak 1.2267 orang lebih, kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 mencapai 2,51%, dan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan tahun 2016 berdasarkan Statistik BPS Provinsi Jawa Tengah selalu di atas nilai 100.³⁰

Menurut Pemerintah Daerah Jawa Tengah, pengembangan peternakan di Jawa Tengah ke depan diarahkan pada pengembangan kawasan peternakan berbasis komoditas unggulan, yaitu sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba, ayam buras, dan itik sesuai dengan *masterplan* Pembangunan Peternakan, di mana kabupaten/kota agar fokus pada komoditas unggulan daerah masing masing sesuai *action plan*-nya daerah tersebut. Beberapa kegiatan utama dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dari APBN dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian difokuskan pada pelaksanaan Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting.³¹

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani. Dengan demikian, subsektor tanaman pangan menjadi penting untuk terus dijaga pertumbuhannya agar selalu positif. Berdasarkan analisis *Differential Shift*, disamping peternakan, tanaman pangan ini termasuk subsektor yang dapat tumbuh dengan sendirinya di Jawa Tengah. Hal ini didukung pula oleh kondisi Jawa Tengah yang merupakan provinsi

dengan kondisi sumberdaya alam yang melimpah. Karena kesuburannya, Jawa Tengah dijuluki sebagai lumbung tanaman pangan, salah satunya adalah padi. Tanaman pangan dibutuhkan sebagai bahan makanan pokok bagi seluruh penduduk. Ketersediaannya harus diperhatikan guna memenuhi kebutuhan makanan pokok secara berkelanjutan dan juga menjaga ketahanan pangan baik saat tidak terjadi bencana, apalagi saat terjadinya bencana.

PENUTUP

Sektor unggulan dan berpotensi unggul yang dapat menjadi basis untuk dikembangkan di Jawa Tengah adalah: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta jasa pendidikan. Peran kinerja sektor-sektor di Indonesia dan di Jawa Tengah sendiri terhadap kinerja perekonomian di provinsi ini tinggi pada sektor: informasi dan komunikasi, konstruksi, perdagangan dan jasa pendidikan dan rendah pada sektor: pertanian, industri pengolahan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial.

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan dan pergeseran ke arah positif di Provinsi Jawa Tengah pascabencana karena faktor-faktor dan kemampuan provinsi Jawa Tengah sendiri antara lain: sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti reparasi mobil dan motor; pertambangan dan penggalian; jasa pendidikan; dan *real estate*. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pertumbuhannya rendah di Jawa Tengah. Namun setelah dianalisis lebih jauh, subsektor peternakan dan perikanan justru dapat tumbuh dengan baik dan menjadi sektor unggulan di Jawa Tengah yang dapat tumbuh karena faktor-faktor ekonomi di Jawa Tengah sendiri. Dengan demikian mengingat kondisi Jawa Tengah yang rawan bencana, pertumbuhan dan potensi yang baik pada subsektor peternakan dan tanaman pangan semoga turut membantu membantu dalam upaya-upaya mitigasi bencana dan penanggulangan bencana alam.

³⁰ RRI.co.id. "Potensi Peternakan Di Jawa Tengah Cukup Besar dan Masih Mempunyai Potensi Untuk Dikembangkan". (*online*), (http://rri.co.id/semarang/post/berita/366555/ekonomi/potensi_peter-nak-an_di_jawa_tengah_cukup_besar_dan_masih_mempunyai_potensi_untuk_dikembangkan). html, diakses 18 November 2018).

³¹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen

- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). *Data Informasi Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Bank Indonesia. (2017). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah November 2017*.
- Biro Pusat Statistik. (2015). *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2014*.
- Biro Pusat Statistik. (2018). *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2017*.
- Biro Pusat Statistik. (2018). *PDB Indonesia Tahun 2014-2018*.
- Biro Pusat Statistik. (2018). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2017*.
- Glasson, John. (1990). *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sihotang. Jakarta: Lembaga Penerbit UI.
- Palang Merah Indonesia dan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2016). *Memperkuat Undang-Undang dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia. Laporan Penilaian Berdasarkan Daftar Periksa*.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Padang: Baduose Media.
- Soeparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tambunan. Tulus H. (2001). *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Artiani, Listya Endang. (2007). Dampak Ekonomi Makro Bencana: Interaksi Bencana Dan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Seminar Nasional Informatika 2011 (semnasIF 2011)* UPN Veteran Yogyakarta, 2 Juli 2011. ISSN: 1979-2328
- Benson, C. (1997). The Economic Impacts of Natural Disasters in Fiji. *ODI Working Paper No. 97*. London: Overseas Development Institute.
- Efriyani, Eva, Nirwana, M. Farid. (2018). Pemetaan Ancaman Bencana Banjir Kecamatan Sungai Serut Sebagai Media Pembelajaran Topik Bahasan Global Warming di SMKN 3 Kota Bengkulu. *Pendipa Journal of Science Education*. 2018:2(1). hlm.100-105.
- Isa, Muzakar. (2016). Bencana Alam: Berdampak Positif Atau Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi? *The 3rd University Research Colloquium 2016*.
- Kusreni. (2009). Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Spesialisasi Sektoral dan Wilayah serta Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral untuk Daerah Perkotaan di Jawa Timur. *Majalah Ekononi Tahun XIX No. 1 April 2009*. Hlm. 21.
- Noy, I., & Nualsri, A. (2007). What do Exogenous Shocks Tell Us about Growth Theories? *University of Hawaii Working Paper 07-28*.
- Rahma, Aldila. (2018). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal. *Varia Pendidikan*. Vol. 30 No. 1 Juli 2018.
- Rasmussen, Henrik. (2012). An Inquiry Into The Effect Of Natural Disasters To Economic Growth: Do Natural Disasters Have Any Effect On Economic Growth? *Master Thesis in Business and Social Sciences*, Aarhus University.
- Siagian, Adinda Putri, Eko Budi Santoso. (2013). Klaster Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan dalam Pengembangan Wilayah di Provinsi Aceh. *Jurnal Teknik Pomits* Vol. 2, No. 2.
- Suryani, Anih Sri. (2017). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bidang Kesehatan Lingkungan Bagi Penyintas Bencana Studi di Provinsi Riau dan Jawa Tengah. *Jurnal Aspirasi* Vol. 8 No. 1 Juni 2017. Hlm. 55-76.

Jurnal dan Artikel

- Zapata-Marti, R. (1997). Methodological Approaches: the ECLAC Methodology. In Center for the Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). In A. o.-m. disasters, *Proceedings of the Expert Consultation on Methodologies*, Brussels, 29–30 September (pp. 10-12). Belgium: Universite Catholique de Louvain.
- Yunan, Z.Y. (2010). Sektor Basis dan Nonbasis di Kotamadya Tangerang Selatan (Suatu Pendekatan Location Quotient). *Jurnal Signifikan* Vol 1. No. 2 Oktober 2010.
- Yurlina, M. Rachmad R, Selamat Rachmadi. (2015). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Batanghari. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3 No. 2 Oktober-Desember 2015.
- Yusral, Junaidi, Adi Bakti. (2015). Klasifikasi Pertumbuhan, Sektor Basis dan Kompetitif Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 2 No. 4, April-Juni 2015.
- Internet**
- Academia.edu. Fajar, Muhammad. (2012). Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Waropen 2013, (*online*). (http://www.academia.edu/12971454/Identifikasi_Sektor_Unggulan_Kabupaten_Waropen_2013, diakses 23 November 2018).
- Bbc.com. Korban Longsor Jawa Tengah, 47 Tewas dan 15 hilang, (*online*). (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160620_indonesia_longsor_purworejo, diakses 17 November 2018).
- Bisnis.com. Usaha di Jateng Didominasi Perdagangan Besar dan Eceran, (*online*). (<http://kabar24.bisnis.com/read/20170525/78/656869/usaha-di-jateng-didominasi-perdagangan-besar-dan-eceran>, diakses 21 November 2018).
- Jpp.go.id. Kontribusi Jawa Tengah untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional, (*online*). (<https://jpp.go.id/ekonomi/perdagangan/302626-geliat-ekonomi-jawa-tengah>, diakses 17 November 2018).
- Kemenkeu.go.id. Bencana Alam dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian, (*online*). (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bencana-alam-dan-pengaruhnya-terhadap-perekonomian/>, diakses 18 November 2018).
- RRI.co.id. Potensi Peternakan Di Jawa Tengah Cukup Besar dan Masih Mempunyai Potensi Untuk Dikembangkan (*online*). (http://rri.co.id/semarang/post/berita/366555/ekonomi/potensi_peternakan_di_jawa_tengah_cukup_besar_dan_masih_mempunyai_potensi_untuk_dikembangkan.html, diakses 18 November 2018).
- Tempo.co. Ketiga Ekonomi Masyarakat Masih Terpusat di 3 Sektor ini. (*online*). (<https://bisnis.tempo.co/read/870009/bps-kegiatan-ekonomi-masyarakat-masih-terpusat-di-3-sektor-ini>, diakses 2 Desember 2018).